

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan RI perlu di susun Profil Kesehatan Kabupaten/Kota. Dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut, infrastruktur pelayanan kesehatan telah dibangun sedemikian rupa mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan seterusnya sampai ke pelosok. Setiap unit infrastruktur pelayanan kesehatan tersebut menjalankan program dan pelayanan kesehatan menuju pencapaian Visi dan Misi Kementerian Kesehatan RI tersebut. Setiap jenjang tersebut memiliki sistem kesehatan yang saling terkait mulai dari pelayanan kesehatan dasar di Desa/Kelurahan, Distrik, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai ke tingkat nasional.

Sistim informasi kesehatan merupakan suatu pengelolaan informasi di seluruh tingkat pemerintah secara sistimatis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan Sistim Informasi Kesehatan (SIK) adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten/kota.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktifitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktifitas. Anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan aktifitas yang direncanakan serta cara untuk mendapatkan dana untuk membiayai program dan aktifitas tersebut.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas. Dan kementrian kesehatan telah melakukan upaya terobosan melalui berbagai perubahan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, salah satunya adalah dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Selain itu, Dinas Kesehatan juga memperoleh dana dukungan manajemen BOK yang dipergunakan untuk kegiatan :

1. Penyelenggaraan pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan, dan evaluasi) tingkat kabupaten/kota yang melibatkan Puskesmas, lintas program, lintas sektor.
2. Penyelenggaraan rapat teknis pengelolaan BOK
3. Pelaksanaan pembinaan monitoring dan evaluasi kegiatan BOK lingkup administrasi dan program ke puskesmas dan jaringannya serta UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat).

4. Pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program BOK ke provinsi.
5. Pelaksanaan konsultasi/rekonsiliasi ke kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN)/kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan Negara (Kanwil DJPbN).
6. Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan BOK ke pusat (berdasarkan undangan dari Pusat).

Dengan penjelasan beberapa kegiatan seperti dipaparkan di atas, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Hartatik, 2015 dengan judul Evaluasi Penggunaan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PADA Dinas Kesehatan Kota Sorong Tahun Anggaran 2015, diketahui bahwa terjadi selisih antara realisasi dan anggaran. Sebab-sebab terjadinya selisih antara realisasi dan anggaran tahun 2015 adalah (1). Terlambatnya penerimaan DIPA tahun 2015 Keterlambatan DIPA yang disebabkan dari terlambatnya Laporan Pertanggung Jawaban dari Dinas Kesehatan Kota Sorong ke Kementerian Kesehatan RI Pusat. (2). Terlambatnya Laporan Pertanggung jawaban dari Dinas Kesehatan Kota Sorong ke Kementerian Kesehatan RI Pusat disebabkan dari terlambatnya LPJ dari tiap-tiap puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota Sorong.

Dengan mengacu pada penelitian terdahulu seperti digambarkan diatas, jika dikaitkan dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, diketahui bahwa masalah yang dialami serupa dengan masalah yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu, dimana masalah yang terjadi pada Dinas Kesehatan Rote Ndao adalah

terjadinya sisa dana bantuan operasional kesehatan yang tidak digunakan bahkan sisa anggaran setiap tahun bervariasi jumlahnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan Judul : **“EVALUASI PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2018”**

1.2.Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan adalah Evaluasi penggunaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018”.

1.3.Persoalan Penelitian

Mengacu pada masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian adalah “Bagaimana penggunaan anggaran bantuan operasional kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018” ?

1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan anggaran bantuan operasional kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademis yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu, dapat menjadi acuan bagi mahasiswa, dan juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Bantuan Operasional Kesehatan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dibangun suatu model bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan akuntansi sektor publik khususnya dalam mengevaluasi penggunaan anggaran bantuan operasional kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018.

b. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao

Diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan.

c. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan.